



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 211/SEK/KU.01/06/2017
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Batas Akhir Pengisian SIRUP

Jakarta, 6 Juni 2017

Kepada Yth:

Para Kuasa Pengguna Anggaran 4 (empat) Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung
di -

Tempat

Menunjuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 362/SEK/HM.02.3/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pengisian Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berdasarkan data yang ada ternyata masih terdapat satker-satker yang belum menginput Rencana Umum Pengadaan ke dalam Aplikasi SIRUP (data terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut agar para Kuasa Pengguna Anggaran yang belum mengisi Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2017 ke Aplikasi SIRUP yang sudah disediakan oleh LKPP pada <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/> untuk segera mengisi Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2017 **selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2017**.

Penginputan Aplikasi SIRUP meliputi belanja modal, belanja barang maupun kegiatan yang sifatnya swakelola bagi seluruh satker Eselon I dan daerah. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum memenuhi kewajibannya, maka **remunerasi pada bulan Juli 2017** ditunda pembayarannya dan akan di bayarkan kembali setelah satker tersebut menginput Rencana Umum Pengadaan ke dalam Aplikasi SIRUP dan apabila ada kendala dalam pengisian Aplikasi SIRUP dapat menghubungi :

No	Nama	Email	No. Hp
1	Jefri Ardianto S.T	j3friardianto@gmail.com	0852 1322 0958
2	Muhammad Rizki Wiriana, SH	rizki.wiriana@gmail.com	0877 7768 8407

Apabila belum memiliki user id Aplikasi (SIRUP) dapat menghubungi :

No	Nama	Email	No. Hp
1	Sofyan Adi Irawan, S.Kom	spoofirawan@gmail.com	0812 8899 8027
2	Yunawan Kurnia, S.Kom	yunawankurnia@gmail.com	0812 8899 8017

Demikian, untuk diindahkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



A. S. Pudjoharsoyo

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial MA RI
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tun MA RI
7. Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI
8. Kepala Badan Pengawasan MA RI
9. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI
10. Kepala Biro Perlengkapan MA RI
11. Kepala Biro Keuangan MA RI
12. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI
13. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada empat Lingkungan Peradilan
14. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada empat Lingkungan Peradilan

Daftar Satuan kerja yang belum menginput Rencana Umum Pengadaan kedalam Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) :

1. PENGADILAN AGAMA BANTAENG
2. PENGADILAN AGAMA BIMA
3. PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
4. PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI
5. PENGADILAN AGAMA JAYAPURA
6. PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
7. PENGADILAN AGAMA KANGEAN
8. PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
9. PENGADILAN AGAMA PACITAN
10. PENGADILAN AGAMA SIDOARJO
11. PENGADILAN AGAMA SURABAYA
12. PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS
13. PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
14. PENGADILAN NEGERI AMBON
15. PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI
16. PENGADILAN NEGERI DOMPU
17. PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
18. PENGADILAN NEGERI IDI
19. PENGADILAN NEGERI KABANJAHE
20. PENGADILAN NEGERI KOTAMUBAGO
21. PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
22. PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
23. PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR
24. PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
25. PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
26. PENGADILAN NEGERI SOE
27. PENGADILAN NEGERI SUMENEP
28. PENGADILAN NEGERI TARUTUNG
29. PENGADILAN NEGERI WONOGIRI